HUKUM BISNIS SEBAGAI ALAT KONTROL DAN KETERLIBATANYA DALAM MENGATASI PERMASALAHAN DALAM BISNIS PERSEROAN TERBATAS

Rosnawati Sasmita¹, Wilma Silalahi²

rosnawati.205230122@stu.untar.ac.id

Universitas Tarumanagara

ABSTRAK

Hukum bisnis berperan penting sebagai alat kontrol dalam menjaga stabilitas, kepastian, dan keadilan dalam aktivitas ekonomi dan dunia usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi hukum bisnis sebagai instrumen pengendali terhadap praktik-praktik bisnis yang menyimpang, seperti monopoli, persaingan usaha tidak sehat, dan pelanggaran kontrak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta studi literatur terhadap penerapan hukum dalam kasus-kasus bisnis. Hukum Bisnis adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan hukum dalam kegiatan bisnis para pihak untuk mendapatkan keuntungan yang dijalankan secara adil. Sedangkan Hubungan Hukum adalah hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain itu wajib memenuhi tuntutan itu, dan sebaliknya. Maka dalam kasus ini Hukum perusahaan juga memberikan dan memastikan bagaimana batasan-batasan terhadap perilaku korporasi melalui berbagai instrumen, seperti kewajiban keterbukaan informasi, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Ketika hukum ditegakkan secara konsisten, maka perusahaan akan terdorong untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari operasionalnya. Namun dalam implementasinya banyak Perusahaan yang masih memandang bahwa regulasi merupakan sebuah beban, bukan sebagai panduan etis. Sudah saatnya hukum perusahaan tidak lagi dipandang sebagai sebuah hambatan birokratis, tetapi sebagai instrumen sosial yang melindungi kepentingan publik di tengah derasnya arus kapitalisme.

Kata Kunci: Hukum Bisnis, Perseroan Terbatas (PT), Kontrol Sosial, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), Good Corporate Governance, Kepastian Hukum, Regulasi Bisnis, Alat Kontrol, Dunia Usaha, Persaingan Usaha.

ABSTRACT

Business law plays an important role as a control tool in maintaining stability, certainty, and justice in economic activities and the business world. This study aims to analyze the function of business law as a control instrument against deviant business practices, such as monopoly, unfair business competition, and breach of contract. The research method used is a normative legal approach with an analysis of relevant laws and regulations, such as Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, as well as a literature study on the application of law in business cases. Business Law is the rules that regulate legal relationships in the business activities of the parties to obtain profits that are carried out fairly. Meanwhile, Legal Relations are reciprocal rights and obligations. One party has the right to demand something from the other, and the other party is obliged to fulfill the demand, and vice versa. So in this case, the company law also provides and ensures how the limits on corporate behavior through various instruments, such as information disclosure obligations, corporate social responsibility (CSR), and the principles of good corporate governance. When the law is consistently enforced, companies will be encouraged to not only pursue profits, but also consider the social and environmental impacts of their operations. However, in its implementation, many companies still view regulation as a burden, not as an ethical guide. It is time that corporate law is no longer seen as a bureaucratic obstacle, but as a social instrument that protects the public

interest in the midst of the rapid flow of capitalism.

Keywords: *Business Law, Limited Liability Company (Pt), Social Control, Corporate Social Responsibility (Csr), Good Corporate Governance, Legal Certainty, Business Regulation, Control Tools, Business World, Business Competition, Legal Certainty.*

PENDAHULUAN

Bisnis merupakan salah satu pilar penopang dalam upaya mendukung perkembangan ekonomi dan pembangunan bangsa. Dalam melakukan bisnis tidak mungkin pelaku bisnis terlepas dari hukum karena hukum sangat berperan mengatur bisnis agar bisnis bisa berjalan dengan lancar, tertib, aman sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya kegiatan bisnis.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini merupakan kegiatan yang melibatkan lebih dari satu individu atau satu organ. Oleh karena itu, pembentuk berjalannya kegiatan ekonomi adalah organ (individu dan atau korporasi dalam jumlah lebih dari satu) yang saling membutuhkan dan saling melengkapi dalam proses kegiatan ekonomi, para pelaku ekonomi yang saling berinteraksi menyebabkan terjadinya transaksi ekonomi.

Tanpa keberadaan hukum Bisnis yang efektif, praktik monopoli, persaingan tidak sehat, pelanggaran kontrak dan penyalahgunaan konsumen serta kepercayaan public terhadap sektor ekonomi,

Pelaku Ekonomi di Indonesia pada hakekatnya sangat bervariasi, baik mengenai eksistensinya di dalam peraturan kegiatannya maupun kedudukan institusinya. Pada strata terendah biasanya terdiri dari pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi diantaranya adalah Perusahaan, sesuai dengan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Disebutkan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Perusahaan adalah suatu pengertian ekonomi yang banyak dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), namun dalam KUHD tidak memberikan penafsiran maupun penjelasan tentang perusahaan. Namun yang mengatur mengenai perseroan adalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1618 KUH Perdata menyatakan, bahwa Perseroan adalah suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan metode hukum normative, yaitu penelitian hukum yang bertitik tolak dari analisis terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Tujuan dari metode ini adalah menjelaskan bagaimana hukum bisnis berfungsi sebagai alat control terhadap kegiatan usaha di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi hukum dari dulu para ahli belum ada satu kesatuan. Masing-masing mereka mendefinisikan yang berbeda-beda pula namun maknanya sama. Namun, tatkala kita akan mempelajari hukum positif (*ius constitutum*) yaitu hukum yang berlaku di suatu negara seperti negara Indonesia, maka tentu perlu sebuah batasan definisi

definisi dalam arti hukum positif yaitu hukum yang berlaku dan dibentuk oleh negara atau atas dasar kesepakatan yang diakui juga sebagai undang-undang.

"Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur pergaulan hidup masyarakat, yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, bersifat memaksa, berisi perintah dan larangan yang apabila dilanggar akan mendapat sanksi yang tegas".

Berdasarkan definisi di atas, dapat diuraikan:

- a. Himpunan peraturan-peraturan yang mengatur pergaulan hidup masyarakat maksudnya adalah bahwa hukum itu dibuat secara tertulis dan tidak tertulis yang terdiri dari kaedah yang mengatur kepentingan-kepentingan masyarakat maupun negara.
- b. Dibuat oleh lembaga yang berwenang adalah hukum tersebut dibuat oleh lembaga yang benar-benar diberi amanat untuk membuatnya oleh rakyat asal tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat sehingga masyarakat aman; tentram, tertib dan damai.
- c. Bersifat memaksa karena hukum itu dalam penegakannya dapat dipaksakan walaupun masyarakat menolaknya.
- d. Berisi perintah dan larangan maksudnya adalah bahwa hukum tersebut adanya sesuatu yang harus dilaksanakan dan sesuatu harus ditinggalkan.
- e. Adanya sanksi yang tegas maksudnya adalah hukum tersebut apabila dilanggar maka mendapat sanksi yang langsung dapat diberikan walaupun melalui proses persidangan terlebih dahulu.

1. Bisnis

Dalam konteks pembicaraan umum, bisnis (*business*) tidak terlepas dari aktifitas produksi, pembelian, penjualan, maupun pertukaran barang dan jasa yang melibatkan orang atau perusahaan. Aktivitas dalam bisnis pada umumnya punya tujuan menghasilkan laba untuk kelangsungan hidup serta mengumpulkan cukup dana bagi pelaksanaan kegiatan si pelaku bisnis atau bisnismen (*businessman*) itu sendiri

Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. Secara historis kata bisnis dari bahasa Inggris *business*, dari kata dasar *busy* yang berarti "sibuk" dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian, sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Atau bisnis dalam arti luas adalah semua aktivitas oleh komunitas pemasok barang dan jasa.

Secara sederhana, bisnis adalah semua kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih yang terorganisasi dalam mencari laba melalui penyediaan produk yang dibutuhkan oleh Masyarakat.

2. Hukum Bisnis

Sistem perekonomian dan kegiatan bisnis yang sehat seringkali bergantung pada sistem perdagangan /bisnis /usaha yang sehat sehingga masyarakat membutuhkan seperti undang-undang yang dengan pasti dapat diberlakukan untuk menjamin terjadinya sistem perdagangan /bisnis tersebut. Istilah hukum bisnis sebagai terjemahan dari istilah "business law". Hukum Bisnis (Business Law) = hukum yang berkenaan dengan suatu bisnis.

Dengan kata lain hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum (termasuk enforcement-nya) yang mengatur tentang tatacara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif (dari entrepreneur tersebut) adalah untuk mendapatkan keuntungan. (Munir Fuady, 2005: 2).

Hukum bisnis di Indonesia sudah diatur di dalam Undang-Undang yang di dalamnya berisi tentang ketentuan-ketentuan bisnis yang harus dijalankan, mulai dari aturan pembentukan badan usaha, investasi atau penanaman modal, ketenagakerjaan, asuransi, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau bisnis.

3. Pembahasan Perseroan Terbatas

Salah satu bentuk usaha yang cukup di minati dalam praktik bisnis adalah Perseroan Terbatas (PT), karena PT diyakini dapat menjadi sarana untuk pemupukan kekuatan modal yang relatif terbatas. Perseroan Terbatas Pertama kali di atur dalam pasal 36 sampai dengan pasal 56 KUHD yang berlaku sejak tahun 1848. Perseroan terbatas adalah salah satu bentuk organisasi Usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia Pada strata menengah ke atas dapat dijumpai beberapa bentuk badan usaha, baik yang bukan Badan Hukum maupun yang mempunyai status sebagai Badan Hukum yaitu Perseroan Terbatas dan Koperasi. Sebagai suatu Korporasi. Perseroan Terbatas (PT) yang dulunya disebut juga dengan Naamloze Vennootschaap (NV) adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Perseroan Terbatas (PT) merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama, dimana perusahaan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyertakan modalnya ke perusahaan dengan cara membeli saham Perusahaan. Selain itu, Perseroan terbatas (PT) adalah badan hukum perusahaan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para pengusaha. Perseroan Terbatas mempunyai kemampuan untuk lebih mengembangkan dirinya dibandingkan dengan Badan Usaha yang lain, terutama yang tidak berbentuk Badan Hukum dalam menjalankan perannya sebagai pelaku ekonomi. Struktur PT memungkinkan pengumpulan modal yang lebih besar dari berbagai investor, baik melalui penawaran saham secara tertutup maupun publik.

Selanjutnya konsekuensi Perseroan Terbatas (PT) sebagai suatu badan hukum sebagai berikut ini:

1. PT dapat memiliki harta kekayaan (*property*) atas nama-nya;
2. Pemilik tidak berkepentingan dalam kekayaan PT (*have no interest*);
3. Pemilik tidak bertanggung jawab atas utang-utang PT;
4. Pemilik tidak bisa digugat langsung oleh kreditor, dalam hal tanggung jawab yang ditimbulkan oleh perseroan.

Badan hukum selain manusia perseorangan dianggap dapat bertindak dalam hukum mempuny ai hak, kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang atau badan lain . Badan hukum adalah suatu badan (*entity*) yang keberadaannya terjadi karena hukum atau undang-undang.

Status badan hukum harus memenuhi persyaratan setelah akta pendirian mendapat pengesahan Menteri: Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan (Pasal 7 ayat (4) UUPT 2007). Hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya.¹⁷ Badan hukum (*rechtspersoon*) adalah badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.¹⁸

Badan hukum, yaitu kumpulan dari orang-orang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan yang berdiri secara sendiri untuk tujuan tertentu . Hubungan antara unsur-unsur perseroan, mulai RUPS, direksi, dan

komisaris dengan calon investor, kreditur, dan kreditur perusahaan. Teori yang dikemukakan oleh para ahli mengenai badan hukum ini sebagai berikut:

1. Teori fictie dari Von Savigny

Badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Menurut alam hanya manusia sebagai subyek hukum, badan hukum itu hanya fictie saja, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) yang se- bagai subyek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.

2. Teori harta kekayaan bertujuan dari Brinz

Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum. Namun juga tidak dapat dibantah hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada manusia pun yang menjadi pendukung hak-hak itu.

3. Teori organ dari Otto van Gierke

Badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada di dalam pergaulan hukum.

4. Teori *Propriete Collective* dari Planiol

Menurut teori ini, hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Selain hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama.

Legalitas operasional kegiatan ekonomi berawal dari ketentuan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. Tujuan dari dibentuknya undang-undang tersebut antara lain:

1. Menjamin kepastian berusaha. Dengan adanya mekanisme pendaftaran perusahaan, tentu pemerintah akan lebih mudah dalam melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan, dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat, sehingga akan mampu memberikan jaminan kepastian berusaha kepada para pelaku usaha. Jaminan kepastian berusaha ini penting karena akan menjadi salah satu tolok ukur para investor untuk mendirikan perusahaan atau menanamkan modalnya di Indonesia.
2. Melindungi perusahaan yang dijalankan secara jujur dan terbukti dari kemungkinan kerugian akibat praktik usaha yang tidak jujur, seperti persaingan curang dan penyelundupan. Dengan kewajiban pendaftaran dapat dicegah atau dihindari timbulnya perusahaan dan badan usaha yang tidak bertanggung jawab serta dapat merugikan perusahaan yang tidak jujur.
3. Melindungi Masyarakat atau konsumen dari kemungkinan akibat perbuatan yang tidak jujur atau insolvable suatu Perusahaan dengan kewajiban pendaftaran Perusahaan dapat diketahui keadaan Perusahaan melalui daftar Perusahaan pada kantor pendaftaran Perusahaan. Daftar Perusahaan bersifat terbuka.
4. Mengetahui perkembangan dunia usaha dan Perusahaan yang didirikan, beroperasi serta berkedudukan di Indonesia melalui daftar Perusahaan pada kantor pendaftaran

Hukum perusahaan berperan penting dalam memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya, termasuk karyawan, konsumen, komunitas, dan pemerintah. Pemangku kepentingan seperti pemegang saham yang dirugikan oleh pengambilalihan paksa dapat mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum bila pengambilalihan paksa memenuhi 4 (empat) unsur perbuatan melawan hukum, yakni pengambilalihan paksa merupakan perbuatan melawan hukum, terdapat kesalahan dari pihak pengambil alih, ada pihak yang dirugikan, dan ada hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian yang diderita. UUPT mengakui bahwa korporasi memiliki kewajiban untuk mematuhi GCG dalam menjalankan operasional perusahaannya (mengingat UUPT, anggaran dasar perusahaan, dan peraturan perundang-undangan lainnya, sebagaimana tercantum dalam

Penjelasan Pasal 4 UUPT). Kewajiban setiap korporasi untuk memenuhi prinsip itikad baik, kepatutan, kepatutan, dan tata kelola perusahaan yang baik mendapat legitimasi dari UUPT. Pengambilalihan paksa menimbulkan kerugian bagi pemegang saham karena ketidakpastian yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, para pemegang saham yang dirugikan oleh pengambilalihan paksa tersebut dapat membuat gugatan perbuatan melawan hukum apabila dapat membuktikan bahwa pengambilalihan paksa tersebut memenuhi keempat unsur di atas. Konsep pemangku kepentingan ini mencakup semua pihak yang terpengaruh oleh kegiatan perusahaan, dan hukum perusahaan berusaha untuk memastikan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan pemegang saham, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari operasional mereka.

a. Karyawan

Hukum perusahaan menetapkan berbagai regulasi yang melindungi hak-hak karyawan. Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur isu-isu seperti upah minimum, jam kerja, keselamatan kerja, dan perlindungan dari diskriminasi. Melalui peraturan ini, perusahaan diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang adil dan aman bagi karyawan. Karyawan yang merasa dihargai dan dilindungi akan lebih termotivasi dan berkontribusi secara positif terhadap kinerja Perusahaan

b. Konsumen

Perlindungan konsumen juga merupakan bagian integral dari hukum perusahaan. Regulasi yang mengatur tentang perlindungan konsumen mengharuskan perusahaan untuk menyediakan produk yang aman dan berkualitas, serta transparan dalam iklan dan pemasaran. Perusahaan yang bertanggung jawab akan memperhatikan umpan balik dari konsumen dan berusaha untuk memperbaiki kualitas produk dan layanan mereka. Dengan memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen, perusahaan dapat membangun loyalitas dan meningkatkan reputasi di pasar

c. Komunitas

Hukum perusahaan juga mendorong perusahaan untuk berkontribusi positif terhadap komunitas di sekitar mereka. Melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), perusahaan dapat terlibat dalam kegiatan yang mendukung pembangunan sosial dan ekonomi lokal, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. CSR bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga menjadi strategi bisnis yang berkelanjutan, di mana perusahaan dapat meningkatkan citra mereka dan menciptakan hubungan yang baik dengan Masyarakat.

d. . Pemerintah

Perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini termasuk kepatuhan terhadap pajak, perlindungan lingkungan, dan berbagai ketentuan hukum lainnya. Dengan mematuhi peraturan ini, perusahaan tidak hanya menghindari sanksi hukum, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial negara. Kerjasama antara perusahaan dan pemerintah dalam proyek-proyek publik atau inisiatif sosial dapat menciptakan dampak positif yang lebih besar bagi Masyarakat

e. Keberlanjutan Lingkungan

Isu keberlanjutan lingkungan semakin menjadi fokus utama dalam hukum perusahaan. Regulasi yang mengatur dampak lingkungan dari kegiatan perusahaan mendorong perusahaan untuk beroperasi dengan cara yang ramah lingkungan. Misalnya, banyak negara telah menerapkan peraturan ketat mengenai emisi karbon, penggunaan sumber daya alam, dan limbah industri. Perusahaan yang mengadopsi praktik keberlanjutan tidak hanya memenuhi kewajiban hukum mereka, tetapi juga menunjukkan komitmen mereka terhadap tanggung jawab sosial, yang semakin dicari oleh konsumen

dan investor saat ini

Tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen adalah aspek penting dalam hukum perusahaan dan merupakan elemen kunci dalam membangun kepercayaan serta loyalitas konsumen. Salah satu tanggung jawab utama yang harus dipenuhi perusahaan adalah keamanan produk. Hal ini berarti bahwa perusahaan berkewajiban untuk memastikan bahwa produk yang mereka produksi dan jual aman digunakan oleh konsumen. Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mengharuskan perusahaan untuk melakukan pengujian dan memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan oleh badan pengawas. Perusahaan harus melakukan pengujian yang memadai untuk produk yang mereka luncurkan ke pasar. Ini mencakup tidak hanya keamanan fisik produk tetapi juga aspek-aspek lain seperti potensi risiko kesehatan. Misalnya, produk makanan harus melalui kontrol kualitas yang ketat untuk memastikan bahwa tidak ada kontaminasi dan produk tersebut aman untuk dikonsumsi. Jika sebuah produk terbukti tidak aman, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk melakukan penarikan produk dari pasar dan memberikan kompensasi kepada konsumen yang terkena dampak. Selain itu, perusahaan juga diharapkan untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai penggunaan dan potensi risiko produk. Ini mencakup label yang tepat, instruksi penggunaan, dan peringatan tentang risiko yang mungkin ditimbulkan. Kegagalan untuk memberikan informasi yang memadai dapat mengakibatkan tanggung jawab hukum bagi perusahaan jika konsumen mengalami kerugian akibat penggunaan produk tersebut. Ini menunjukkan bahwa transparansi dan komunikasi yang baik antara perusahaan dan konsumen adalah kunci dalam memelihara tanggung jawab terhadap keamanan produk. Pentingnya tanggung jawab ini juga tercermin dalam bagaimana konsumen semakin menyadari hak-hak mereka dan mengharapkan perusahaan untuk beroperasi dengan etika dan integritas. Dalam era informasi ini, konsumen memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi mengenai produk, termasuk ulasan dan laporan tentang keamanan produk. Oleh karena itu, perusahaan yang gagal memenuhi tanggung jawab terhadap keamanan produk berisiko kehilangan reputasi dan kepercayaan konsumen. Dampak hukum perusahaan terhadap komunitas dan lingkungan sangat signifikan, karena kegiatan perusahaan dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Hukum perusahaan menetapkan kerangka kerja yang mengatur bagaimana perusahaan beroperasi, dan hal ini mencakup tanggung jawab sosial serta kewajiban lingkungan yang harus dipatuhi. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi positif terhadap komunitas tempat mereka beroperasi. Hukum perusahaan, melalui regulasi yang ada, mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan dampak sosial dari kegiatan mereka. Ini dapat mencakup penciptaan lapangan kerja, pemberian pelatihan, dan pengembangan keterampilan kepada karyawan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi komunitas. Selain itu, perusahaan diharapkan untuk terlibat dalam program-program sosial yang mendukung pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di lingkungan mereka. Ketidakpatuhan terhadap tanggung jawab ini dapat mengakibatkan sanksi hukum, serta merusak reputasi perusahaan di mata publik. Dari segi lingkungan, hukum perusahaan berperan dalam mengatur bagaimana perusahaan harus mengelola dampak lingkungan dari operasi mereka. Regulasi mengenai emisi, pengelolaan limbah, dan penggunaan sumber daya alam dirancang untuk melindungi lingkungan dari kerusakan akibat aktivitas bisnis. Misalnya, perusahaan yang beroperasi di sektor industri harus mematuhi standar lingkungan yang ketat untuk mengurangi polusi udara dan air, serta mengelola limbah berbahaya dengan aman. Pelanggaran terhadap regulasi ini dapat mengakibatkan denda yang signifikan dan tindakan hukum, serta dampak negatif pada reputasi perusahaan. Perlindungan hukum bagi

pemangku kepentingan sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan hak-hak pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Dengan adanya hukum perusahaan yang memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan, diharapkan tercipta hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara perusahaan dan pihak-pihak terkait, sehingga tidak hanya memajukan bisnis tetapi juga mendukung kesejahteraan sosial dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

KESIMPULAN

Hukum bisnis memiliki peran strategis sebagai alat kontrol dalam dunia usaha modern. Fungsinya tidak terbatas pada pembentukan norma-norma hukum yang mengatur aktivitas ekonomi, melainkan juga sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian terhadap perilaku para pelaku usaha agar tetap sejalan dengan prinsip legalitas, keadilan, dan etika bisnis. Melalui pengaturan kontrak, perlindungan konsumen, pengawasan terhadap persaingan usaha, serta penyelesaian sengketa, hukum bisnis menciptakan kepastian hukum dan stabilitas dalam iklim investasi dan perdagangan.

Keberadaan hukum bisnis yang efektif memungkinkan terciptanya struktur pasar yang sehat, mendorong inovasi dan efisiensi, serta melindungi kepentingan publik dari praktik-praktik bisnis yang merugikan. Dengan demikian, hukum bisnis tidak hanya menjadi alat preventif yang membatasi tindakan pelaku usaha agar tidak menyimpang, tetapi juga bersifat korektif dalam menyelesaikan konflik serta represif dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran.

Oleh karena itu, dalam konteks pembangunan ekonomi nasional dan global, hukum bisnis yang adaptif, responsif, dan ditegakkan secara konsisten menjadi salah satu pilar penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan. Implikasi praktisnya adalah perlunya pembaruan regulasi yang mengikuti dinamika pasar serta penguatan lembaga penegak hukum agar fungsi kontrol hukum bisnis dapat berjalan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Eddhie Praptono, SH, MH, (2021). Pengantar Hukum Bisnis, Tanah Air Beta.
- Hirman, S.H., M.Hum. Yuni Purwati, S.H., M.Hum. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum. (2017). Hukum Perseroan Terbatas, Pustaka iltizam.
- KBP Dr. Sulastiana, S.I.P., S.H., M.Si. Dr. Teddy Oswari, S.E., M.M., M.I.Kom. (2024). Hukum Bisnis, PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA
- Muchlis adnan, I., Hamim, S., & Ramon, T. (2016). Hukum Bisnis. Trussmedia Grafika
- Rifda. (2025, 19 Juli). Apa Itu PT: Pengertian, Ciri, Syarat Mendirikan. [2025,02 Mei], dari https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2024/07/19/apa-itu-pt-perseroan-terbatas/#Apa_Itu_PT_atau_Perseroan_Terbatas
- Rizka Afi Aryana, Gresia Wulaning Rum, Rijal Jajuly, (2024), Peran Hukum Perusahaan Dalam Melindungi Kepentingan Pemegang Saham Dan Pemangku Kepentingan, Jurnal Kritis Studi Hukum
- Suliyanto, op.cit., h. 20, Kasmir dan Jakfar, op.cit., h. 26. (2015). Repository UIN Suska ,Tinjauan Teoritis A. Pengertian Perseroan, Volume (), 01.
- Yusita, Mahasiswi Hukum Universitas Bangka Belitung, (2025, 23 April). Peranan Hukum Perusahaan sebagai Alat Kontrol Sosial di Era Kapitalisme Modern, [2025, 02 Mei], dari <https://www.tamiang-news.com/2025/04/peranan-hukum-perusahaan-sebagai-alat.html>